

Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Annisa Lantang Madany^{1*}, Neni Maryani²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Email: ¹⁾ annisalantang_2360107030@ak.unjani.ac.id, ²⁾ neni.maryani@lecture.unjani.ac.id

Received : 10 January - 2025

Accepted : 13 February - 2025

Published online : 15 February - 2025

Abstract

The aim of this research is to understand and analyze the Implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in Regional Apparatus of Bandung City Government, as well as the challenges and solutions for implementing SIPD in Regional Apparatus of Bandung City Government. This is a qualitative research study. The research method used in this study is descriptive research. The data validation technique used is triangulation because the data collection in this research was conducted through three (3) methods: interviews, documentation, and observation. SIPD in Bandung City has been functioning fairly well in supporting regional planning, budgeting, and financial reporting, although it still faces several challenges. From the user aspect, the system has involved relevant officials who have competencies according to their duties. However, the lack of official technical guidelines has led to non-uniform understanding of SIPD usage procedures. Data management has been systematic, but there are still information gaps in Musrenbang proposals, which hinder validation and planning. From the software perspective, the web-based SIPD provides administrative ease, but often experiences technical issues, such as login failures and document printing problems, with slow central response. Supporting infrastructure is adequate, but central server capacity often faces constraints, especially during high access periods. Additionally, internal control is not yet optimal because the Inspectorate still relies on physical documents, making real-time supervision suboptimal. To address these challenges, more comprehensive technical guidelines, improved data quality, software optimization, strengthened server infrastructure, and enhanced role of the Inspectorate in system supervision are needed.

Keywords: Regional Government Information System, Regional Apparatus, Efficiency, Supervision.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bandung. Serta kendala dan solusi atas pengimplementasian SIPD pada Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bandung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah triangulasi dikarenakan di dalam sebuah penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan tiga (3) cara, yaitu wawancara, dokumentasi, serta observasi. SIPD di Kota Bandung telah berjalan cukup baik dalam mendukung perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah, meskipun masih menghadapi beberapa kendala. Dari aspek pengguna, sistem telah melibatkan pejabat terkait yang memiliki kompetensi sesuai tugasnya. Namun, kurangnya petunjuk teknis resmi menyebabkan pemahaman yang belum seragam dalam prosedur penggunaan SIPD. Pengelolaan data sudah sistematis, tetapi masih terdapat kekurangan informasi dalam usulan Musrenbang, yang menghambat validasi dan perencanaan. Dari sisi perangkat lunak, SIPD berbasis web memberikan kemudahan administrasi, tetapi sering mengalami gangguan teknis, seperti gagal login dan pencetakan dokumen, dengan respons pusat yang lambat. Infrastruktur pendukung cukup memadai, namun kapasitas server pusat sering mengalami kendala, terutama saat akses tinggi. Selain itu, pengendalian internal belum optimal karena Inspektorat masih bergantung pada dokumen fisik, sehingga pengawasan real-time belum maksimal. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan petunjuk teknis yang lebih komprehensif, peningkatan



kualitas data, optimalisasi perangkat lunak, penguatan infrastruktur server, dan peningkatan peran Inspektorat dalam pengawasan sistem.

Kata Kunci: Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Efisiensi, Pengawasan.

1. Pendahuluan

Berdasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Pemerintah mengeluarkan sebuah aplikasi yang berguna untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang akan terintegrasi secara akurat. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) digunakan sebagai alat bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, serta pada akhirnya digunakan sebagai pelaporan. Pemerintah Kota Bandung sendiri mulai menerapkan penggunaan SIPD pada Tahun 2020 untuk melakukan pengelolaan Anggaran Tahun 2021.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) digunakan oleh pemerintah guna melakukan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap awal perencanaan hingga tahap akhir pembuatan laporan. Penggunaan aplikasi SIPD memberikan angin segar di instansi pemerintah terutama bagian yang memiliki tanggung jawab terhadap anggaran. Kode rekening yang sebelumnya masih disatukan untuk tiap belanja dan belum terkodifikasi secara sempurna. SIPD juga sudah memberikan fitur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan pelaporan.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sebuah inovasi guna meningkatkan pengelolaan keuangan serta Pembangunan daerah yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pengelolaan data. Namun, terdapat permasalahan utama yang mungkin pengguna SIPD di seluruh Indonesia merasakan, yaitu masih sering terjadinya error pada sistem SIPD. Gangguan teknis ini dapat menyebabkan kesulitan untuk mengakses data, namun juga dapat mempengaruhi kinerja pegawai yang mana pekerjaannya sangat bergantung pada aplikasi ini. Misalkan saja saat akan melakukan cetak DPA dan RKA, dimana dokumen tersebut harus diunduh dulu dari SIPD, namun terkadang SIPD tersebut tidak bisa diakses sehingga harus menunggu dulu. Padahal cetak DPA dan RKA yang seharusnya cepat dilakukan guna meminta tanda tangan pimpinan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pencairan dana menjadi terhambat prosesnya, sebagaimana penulis telah melakukan wawancara pendahuluan ke beberapa pegawai yang ada.

Tabel 1. Data Permasalahan SIPD

No	Sub Fokus	Permasalahan
1	Prosedur	Waktu pembukaan akses aplikasi tidak menyesuaikan dengan hari kerja yang ada, terkadang akses tersebut dibuka pada saat hari libur sehingga beberapa orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penginputan anggaran terpaksa harus merelakan waktu liburnya untuk bekerja.
2	Perangkat lunak	Aplikasi susah diakses, hal ini sangat sering terjadi di lingkungan pemerintah daerah dan menyebabkan kebingungan bagi pegawai terkait dengan keterbatasan aplikasi dan juga keterbatasan waktu yang ada.
3	Perangkat Lunak	Di dalam SIPD masih suka <i>error</i> untuk <i>server</i> -nya, terkadang ketika membutuhkan data cepat dari SIPD, aplikasi tidak bisa diakses sehingga menghambat kinerja dan proses yang harus dilakukan selanjutnya.
4	Prosedur	Tidak ada SOP terkait dengan Implementasi SIPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Hanya ada buku manual sederhana dari Kemendagri.

Sumber : Olahan data penulis (2024)

Atas permasalahan yang ada, peneliti bertujuan untuk melakukan eksplorasi lebih terkait dengan implementasi SIPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini akan melakukan analisa lebih dalam terkait dengan bagaimana implementasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan beberapa permasalahan yang terjadi di dalamnya. Selain itu atas kendala yang ada peneliti juga menganalisa solusi yang memungkinkan untuk dilakukan terutama bagi Pemerintah Kota Bandung sendiri.

Berbagai penelitian telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dimana disebutkan oleh Nasution dan Nurwani (2021) bahwa pada BPKAD di Kota Medan telah menerapkan penggunaan SIPD dalam melakukan eksekusi program pemerintah baik dari sistem dalam perencanaan, sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan lainnya. Kemudian (Ekaputra,2021) menyebutkan bahwa penggunaan SIPD di dalam penyusunan dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk, mengalami beberapa temuan dalam penyusunannya, yaitu adanya permasalahan terkait sulitnya pengaksesan aplikasi SIPD yang terjadi hingga penyusunan dokumen RKPD yang menjadi tidak efektif. Sutisna et al. (2022) menyebutkan bahwa implementasi penyusunan anggaran belanja pada SIPD di Kota Bandung belum optimal, hal ini diindikasikan karena belum meratanya SDM yang kompeten dalam penyusunannya. Selain itu Sobandi & Herdianti (2023) menyebutkan juga bahwa penggunaan aplikasi SIPD belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan, aplikasi SIPD masih memiliki kekurangan khususnya pada saat proses perencanaan pembangunan.

Adanya fenomena permasalahan terkait dengan opini BPK atas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2022 juga terdapat beberapa kendala serta belum efektifnya penggunaan SIPD di beberapa daerah sesuai yang dinyatakan pada penelitian sebelumnya, menjadi dasar yang menguatkan ide dari adanya penelitian ini. Hal ini memberikan ide bagi peneliti untuk meneliti Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bandung. Serta mengetahui kendala dan solusi atas pengimplementasian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bandung.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Romney

Grand theory yang mendasari adanya penelitian ini adalah Teori Romney yang dapat dijadikan dalam studi sistem informasi dimana pada teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana sebuah sistem informasi dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi. Teori ini dikembangkan dari buku *Accounting Information Systems* oleh Marshall B. Romney dan Paul J. Steinbart, yang menekankan enam komponen utama dalam pengelolaan sistem informasi. Sebagai, *grand theory* Teori Romney dapat menjelaskan hubungan kompleks antara enam komponen utama, yaitu pengguna (*users*), data, prosedur (*procedures*), infrastruktur (*infrastructure*), perangkat lunak (*software*), dan pengendalian internal (*internal control*). Teori ini dapat diterapkan di berbagai sektor, termasuk pada implementasi sistem pemerintahan digital seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

2.2. Sistem Informasi

Menurut Rukun dan Hayadi (2018) menjelaskan bahwa “Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari beberapa komponen dalam suatu perusahaan atau sebuah organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi”. Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2015) menyebutkan bahwa sistem informasi merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan, memproses, mengelola, serta melaporkan informasi agar organisasi dapat mencapai tujuan serta sasarnya.

2.3. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang digunakan guna mempercepat dan mempermudah pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi akuntansi yang digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan (Nisa & Muntiah, 2024). Menurut Mujilan (2012), sistem informasi akuntansi merupakan suatu kumpulan sumberdaya, seperti manusia serta peralatan yang diatur guna mengubah data menjadi sebuah informasi, dimana informasi ini dikomunikasikan kepada beragam pengambil keputusan. Terdapat enam komponen sistem informasi akuntansi menurut Romney (2015), yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang memakai sebuah sistem.
2. Prosedur dan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan juga menyimpan data.
3. Data, mengenai aktivitas organisasi dan bisnis.
4. Perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses data.
5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, perangkat perriferal, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam Sistem Informasi Akuntansi.
6. Pengendalian internal serta langkah keamanan yang menjaga data Sistem Informasi Akuntansi.

2.4. Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sebuah sistem milik pemerintah yang dirancang guna memberikan data serta informasi pembangunan daerah yang terintegrasi serta akurat. Adanya SIPD merupakan sebuah solusi dari permasalahan yang ada di masa lalu, seperti data-data pembangunan daerah yang cenderung tidak lengkap dan belum terintegrasinya data, dimana data masih tersebar pada masing-masing perangkat daerah. Aplikasi SIPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dimana Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SIPD merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Ruang lingkup dari SIPD meliputi:

1. Informasi Pembangunan Daerah;
2. Informasi Keuangan Daerah; dan
3. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

SIPD disebarluaskan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. SIPD dikembangkan guna menghasilkan sebuah layanan informasi Pemerintah Daerah yang saling terhubung satu sama lain dan terintegrasi dengan basis elektronik. Pada SIPD terdapat dua jenis informasi yang ada, keduanya adalah informasi pembangunan daerah serta informasi keuangan daerah.

2.5. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Implementasi penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 391 dari Undang-Undang ini menetapkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 mengenai Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Implementasi kebijakan terkait dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang umum digunakan meliputi beberapa dimensi penting yang harus dipahami dalam rangka mengukur efektivitas implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Menurut Usman (2002), implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.

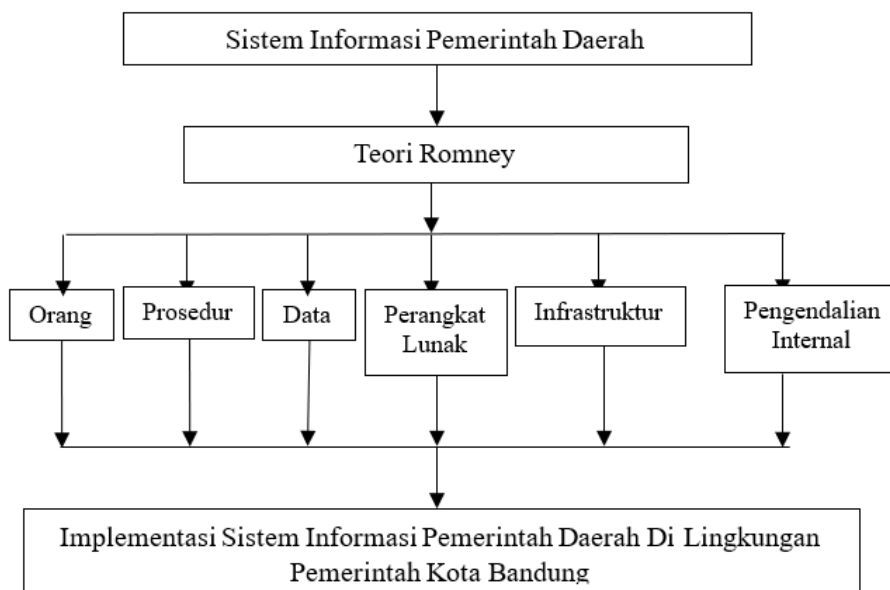
2.6. Kerangka Pemikiran

Teori Romney terkait dengan sistem informasi menjadi sebuah dasar guna memahami implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Sistem informasi terdiri atas serangkaian komponen yang berkaitan satu dengan yang lain. Dimana menurut teori Romney komponen yang ada adalah, pengguna (orang), prosedur, data, perangkat lunak, infrastruktur, dan pengendalian internal.

Salah satu aspek penting dalam teori ini adalah kualitas atas informasi yang dihasilkan dari sistem yang ada. Romney dan Steinbart (2015) menyatakan bahwa informasi yang barik merupakan data yang sudah dikelola serta diproses guna memberikan makna kepada pengguna sehingga dapat menjadi dasar atas pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam konteks implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), teori ini memberikan kerangka kerja guna memahami bagaimana sistem ini beroperasi dan berfungsi.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ekaputra (2021) menyebutkan bahwa penggunaan SIPD di dalam penyusunan dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk, mengalami beberapa temuan dalam penyusunannya, yaitu adanya permasalahan terkait sulitnya pengaksesan aplikasi SIPD yang terjadi hingga penyusunan dokumen RKPD yang menjadi tidak efektif. Sutisna et al. (2022) menyebutkan bahwa implementasi penyusunan anggaran belanja pada SIPD di Kota Bandung belum optimal, hal ini diindikasikan karena belum meratanya SDM yang kompeten dalam penyusunannya. Selain itu Afifah et al. (2023), menyebutkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD meliputi perencanaan, sosialisasi, pengisian data, dan monitoring. Beberapa kendala dihadapi, namun upaya dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian lainnya menyebutkan bahwa penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan SIPD sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun ada kendala dalam jaringan dan kurangnya perda yang mengatur SIPD (Karundeng et al., 2021).

Berdasarkan teori yang ada dapat dibuat sebuah bagan yang menghubungkan semuanya, gambaran bagan tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang dilakukan berupa kata-kata, gambar, atau perilaku, serta tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan menggunakan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Metode ini memfokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada.

3.2. Data dan Informasi

Data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua jenis utama: Data Primer dan Data Sekunder. Data utama dikumpulkan guna menjawab pertanyaan dari peneliti. Sumber data pada penelitian ini adalah 4 (empat) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang staf di Bappelitbang (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan), 1 (satu) staf di BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah), 1 staf di Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah Kota Bandung, dan 1 staf di Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung. Selain itu data juga didapat dari dokumen serta bahan lainnya. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik dan instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara (lisan dan tertulis), observasi, dan dokumentasi. Teknik digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dari pengguna SIPD mengenai pengalaman mereka, kepuasan, dan persepsi terhadap sistem.

1. Kepustakaan

Pada penelitian ini mengumpulkan data dan informasi dari studi pustaka, mulai dari buku, karya tulis ilmiah, peraturan, serta sumber ilmiah lainnya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik yang dilakukan menggunakan metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan maupun tertulis kepada subjek penelitian. Data yang dikumpulkan merupakan sebuah masalah yang bersifat kompleks, sensitive, atau kontroversial (Indriantoro & Supomo, 2002).

3. Observasi

Menurut Sugiyono (2016), observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan bekerja berdasarkan atas data dan fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

3.3. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data atau teknik pemeriksaan keabsahan data adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memastikan validitas dan kredibilitas data serta temuan penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah triangulasi dikarenakan di dalam sebuah penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan tiga (3) cara, yaitu wawancara, dokumentasi, serta observasi. Menurut Lexy (2011), triangulasi merupakan cara menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada pada konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data mengenai berbagai kejadian dan hubungan dari pandangan yang ada.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini mengikuti analisis dari Sugiyono (2016) Berikut adalah penjelasan rinci mengenai langkah-langkah tersebut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah tahap awal dalam proses analisis di mana data yang telah dikumpulkan disaring dan diperkecil. Data yang sudah direduksi akan memberi gambaran yang jelas serta mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, tahap berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan di dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan ini harus didukung oleh data yang ada dan diperiksa untuk memastikan keakuratannya. Proses ini seringkali melibatkan verifikasi dan validasi temuan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Implementasi SIPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

A. Pengguna

Pengguna adalah orang-orang yang merupakan pengguna yang menggunakan informasi secara internal maupun eksternal, dimana pengguna internal adalah orang yang menggunakan informasi untuk kegiatan sehari-hari dan pengguna eksternal adalah pengguna yang ada di luar organisasi. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada pengguna internal yaitu pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Pada Implementasi SIPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dapat diketahui bahwa pengguna SIPD sudah memenuhi syarat yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, dimana pengguna SIPD merupakan para pegawai yang menduduki jabatan pejabat perbendaharaan seperti PA (Pengguna Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kemudian ada Bendahara yang mana ada Bendahara Penerimaan pada, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pembantu. Selain itu juga terdapat pegawai Non-PNS yang memiliki tugas sebagai operator

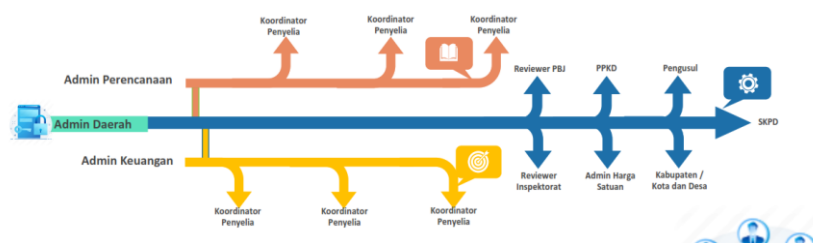
SIPD, dimana hal ini tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana hal ini tidak diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019.

B. Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan yang melibatkan beberapa orang di suatu bagian yang mana disusun guna menjamin adanya perlakuan terkait dengan pengumpulan data, proses pengelolaan data, serta pemantauan dan evaluasi sistem pada SIPD. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan terkait dengan prosedur pada implementasi SIPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah sesuai dengan yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, dimana disebutkan bahwa prosedur implementasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sudah menyesuaikan prosedur yang dibuat khusus oleh Pemerintah Kota Bandung dengan Permendagri yang ada. Pemerintah Kota Bandung telah membuat video tutorial pemakaian aplikasi SIPD mulai dari proses awal perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan.

C. Data

Data adalah sebuah kumpulan fakta yang dapat memberikan arti atas pengertian di dalamnya yang mana merupakan sumber daya penting dari sebuah organisasi. Pada Implementasi SIPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terkait dengan data pada SIPD yang mana merujuk pada proses pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data pada aplikasi SIPD sudah dapat menggambarkan keseluruhan dari proses pengelolaan keuangan. Data yang ada mulai dari usulan dari masyarakat melalui Musrenbang yang selanjutnya akan diolah oleh Bappelitbang sebagai penyelia dan koordinator perencanaan. Ketika data sudah divalidasi oleh Mitra Bappeda maka usulan yang ada akan naik ke tahap selanjutnya yaitu ke level kecamatan, selanjutnya akan masuk ke level perangkat daerah yang bersangkutan dengan usulan yang ada.



Gambar 2. Alur perencanaan pada SIPD

Kemudian dari usulan yang ada, akan divalidasi oleh Bappelitbang, selanjutnya akan divalidasi oleh Kecamatan, lalu setelah masuk ke Perangkat Daerah akan divalidasi dan masuk ke TAPD Bappelitbang, yang mana jika disetujui maka usulan dapat dilaksanakan. Selanjutnya pada tingkat Perangkat Daerah, mereka akan melakukan peng-input-an perencanaan mulai dari program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, dan juga anggaran yang ada. Kemudian akan dicetak menjadi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan RKA (Rencana Kerja Anggaran). Dimana dari dokumen tersebut akan diberikan kepada BKAD sebagai dasar proses pencairan dana dan penatausahaan keuangan.

D. Software atau Perangkat Lunak

Perangkat lunak adalah sebuah objek yang dimana di dalamnya terdapat kode kode yang menjadi sebuah program. Dimana perangkat lunak yang berbasis web dapat berkembang dan dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam proses kegiatan di suatu perusahaan atau organisasi pemerintah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa fungsi dari

perangkat lunak SIPD sudah memberikan kemudahan dalam melakukan proses administrasi dalam pemerintahan, dimana di dalam SIPD sudah mencakup semua proses yang ada mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Walaupun masih ada beberapa fitur yang belum muncul tapi sudah dapat mewakili dan menggambarkan proses organisasi. Kemudian terkait dengan penggunaan akses SIPD, di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah dibedakan berdasarkan atas peran pada masing-masing perangkat daerah. Dimana ada akun admin TAPD perencanaan, TAPD keuangan, admin kepala SKPD.

E. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan sebuah sistem yang menunjang sistem ekonomi yang mana dapat menjadi sebuah perantara dalam pengambilan kebijakan. Dalam penelitian ini pada infrastruktur terdiri atas perangkat keras dan lunak serta Sumber Daya Manusia (SDM). Pada implementasi SIPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, tidak ada masalah terkait dengan perangkat keras dimana semua sudah memadai termasuk pada komputer kantor serta laptop kantor yang digunakan pada saat melakukan pekerjaan di rumah. Terkait dengan perangkat lunak termasuk pada server SIPD yang masih kurang sehingga dapat menyebabkan adanya gangguan ketika penggunaan terlalu berat. Selanjutnya terkait dengan SDM, sebagian besar sudah memadai karena pekerjaan yang dilakukan pada SIPD merupakan pekerjaan yang sebelumnya sudah dikerjakan secara manual sehingga pegawai yang ada sudah memenuhi kuota kebutuhan dari pengguna pada SIPD. Namun, untuk di Bappelitbang dan BKAD pegawai masih terbatas yang mana tidak sejalan dengan banyaknya kapasitas dari pekerjaan yang ada.

F. Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah sebuah proses yang dilakukan oleh jajaran manajemen yang dirancang untuk memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan dari sebuah organisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait dengan pengendalian internal dalam implementasi SIPD di Pemerintah Kota Bandung ditemukan bahwa belum ada pengendalian internal yang dilakukan oleh Inspektorat selaku APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), yang mana seharusnya juga menjadi pengawas internal dari SIPD yang mana telah diamanatkan pada aplikasi SIPD menjadi seorang admin reviewer SIPD.

4.2. Kendala dan Solusi atas permasalahan pada Implementasi SIPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Berdasarkan hasil penelitian terkait kendala atas permasalahan yang ada pada implementasi SIPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, tidak semua sub fokus yang ada pada penelitian ini memiliki kendala. Dimana kendala yang ada pada Pemerintah Kota Bandung terkait dengan Prosedur, Data, Software, Infrastruktur, dan Pengendalian Internal.

A. Prosedur

Permasalahan dan kendala yang ada pada implementasi SIPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah terkait dengan belum adanya tutorial yang runtut dan jelas mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan langsung dari Kementerian Dalam Negeri. Adanya hanya peraturan yang dibuat menjadi sebuah juknis atau buku panduan sederhana saja. Belum ada juga juknis (petunjuk teknis) yang jelas sehingga perangkat daerah harus mencari-cari sendiri.

Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah pembuatan video tutorial mulai dari awal penginputan hingga akhir pelaporan. Dimana video ini dibuat oleh Bappelitbang dan juga BKAD. Selain itu dilakukan juga Bimtek (Bimbingan Teknis) oleh

kedua perangkat daerah tersebut, dimana mereka akan mengundang seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Mulai dari pertemuan tatap muka dan juga pertemuan online melalui aplikasi Zoom.

Solusi yang ditawarkan oleh penulis adalah pembentukan forum diskusi internal atau forum grup discussion untuk semua OPD dimana nanti yang sudah mengerti terkait SIPD dapat saling bertukar pendapat dan ilmu satu sama lain, tidak hanya berfokus pada Bappelitbang dan juga BKAD. Membuat portal atau website khusus terkait dengan semua proses yang ada pada SIPD untuk memudahkan semua orang mengakses tutorial dan panduan terkait informasi serta penggunaan SIPD. Dimana ketika ada perubahan pengguna di suatu OPD tidak akan terlalu susah karena informasi yang sudah ada.

B. Data

Permasalahan atau kendala yang ada terkait dengan data pada implementasi SIPD adalah kurang lengkapnya data yang disampaikan terkait dengan Musrenbang, dimana tidak ada kolom untuk menyampaikan anggaran. Bappelitbang menguraikan permasalahan yang ada satu per satu padahal sebelumnya ketika ada aplikasi E-Musrenbang milik Pemerintah Kota Bandung, sudah diterapkan kolom permintaan yang sesuai dengan kebutuhan data pada usulan yang ada.

Solusi yang ditawarkan oleh peneliti adalah adanya lampiran tambahan misalkan berupa excel sebagai pelengkap terkait dengan Musrenbang. Kemudian diadakan asistensi terkait dengan usulan Musrenbang untuk melakukan penyesuaian dan pencocokan data yang ada. Selanjutnya dapat membuat usulan perubahan atau tambahan kolom terkait kekurangan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri agar selanjutnya ditindaklanjuti dan diperbaiki aplikasi SIPD yang ada.

C. Software atau Perangkat Lunak

Permasalahan terkait dengan perangkat lunak pada implementasi SIPD adalah adanya error pada aplikasi seperti aplikasi SIPD yang tidak bisa dibuka atau diakses, tiba-tiba aplikasi tidak berjalan, gagal cetak RKA dan DPA. Hal ini terjadi beberapa kali terutama saat pembukaan akses SIPD. Ketika banyak orang yang melakukan akses SIPD, tiba-tiba aplikasi tidak bisa dibuka atau data tidak muncul padahal sudah terisi di aplikasi SIPD.

Solusi yang dilakukan adalah menghubungi helpdesk BKAD atau Bappelitbang jika yang error adalah dari perangkat daerah. Setelahnya Bappelitbang dan BKAD akan meneruskan ke Kementerian Dalam Negeri. Mereka memiliki contact person langsung dari Kementerian Dalam Negeri, namun terkadang lama untuk ditindaklanjuti karena banyak juga orang-orang yang memiliki masalah serupa terkait dengan SIPD. Selain itu BKAD pernah melakukan kunjungan langsung ke Kementerian Dalam Negeri untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi terkait di SIPD.

Solusi yang ditawarkan oleh penulis adalah jangan membuka SIPD pada banyak tab sekaligus. Melakukan backup data sebelum sinkronisasi data. Mencari tau helpdesk SIPD lebih dari satu agar dapat mendapatkan penanganan lebih cepat. Tidak menumpuk pengerjaan terkait di SIPD sehingga masih banyak waktu yang dapat digunakan untuk mengerjakan jika ada error terjadi.

D. Infrastruktur

Permasalahan terkait dengan infrastruktur pada implementasi SIPD adalah berfokus pada infrastruktur server dimana seringkali aplikasi SIPD tidak dapat diakses karena adanya server down. Hal ini sebenarnya di luar kendali dari Pemerintah Kota Bandung karena server SIPD ada di pusat, yaitu ada di Kementerian Dalam Negeri. Sehingga kita sebagai user hanya bisa menunggu saja ketika terjadi error karena server. Ketika hal itu terjadi terkadang data

yang ada menjadi tidak muncul. Selain itu juga ada kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bappelitbang terkait dengan user yang menangani proses SIPD perencanaan sehingga pekerjaan yang ada masih berfokus pada satu orang saja yang mengerjakan.

Solusi yang dilakukan adalah menghubungi helpdesk dari Kementerian Dalam Negeri, selain itu juga menunggu sampai server-nya sudah kembali lagi. Solusi lain yang ditawarkan oleh penulis adalah menggunakan SIPD di luar jam sibuk, misalkan di pagi hari atau malam hari di luar jam kerja. Selain itu juga dapat mencoba menggunakan perangkat atau browser yang berbeda. Kemudian bisa juga memberikan jadwal pembagian pembukaan akses SIPD untuk perangkat daerah agar tidak saling bertumpuk dan memberatkan penggunaan server. Terkait dengan SDM, dapat juga melakukan pengajuan ke BKPSDM Kota Bandung untuk mengusulkan tambahan orang yang memiliki kompetensi dimana ia dapat mengisi kekurangan dan kekosongan yang ada di Bappelitbang.

E. Pengendalian Internal

Permasalahan terkait dengan pengendalian internal adalah belum adanya pengendalian yang dilakukan oleh Inspektorat di Pemerintah Kota Bandung terkait dengan SIPD. Inspektorat masih hanya berfokus pada dokumen fisik terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan, namun belum ada pengendalian internal langsung pada aplikasi SIPD. Inspektorat masih tergantung pada laporan manual dari OPD.

Solusi dengan membuat aplikasi di luar SIPD seperti SiMonel yang dikembangkan oleh Bagian Administrasi Pembangunan untuk melakukan monitoring atas realisasi yang ada pada aplikasi SIPD. Selain itu Bappelitbang dan BKAD juga memiliki estándar tersendiri terkait dengan pengawasan, contoh sederhananya adalah rincian belanja yang ada tidak boleh melebihi pagu yang telah ditetapkan. Adanya prosedur bersurat yang harus dilakukan untuk melakukan perubahan data yang ada pada SIPD.

Solusi yang ditawarkan oleh penulis adalah peningkatan hak akses inspektorat, etika pada SIPD dapat diberikan akses penuh terkait tentang data yang ada pada SIPD terkait seluruh proses yang dilakukan pada SIPD. Kemudian, adanya Pembangunan etika early warning yang mana dapat mendeteksi etika ada gejala anggaran yang terjadi dari tahun sebelumnya. Selain itu adanya tiga pengawas saat dilakukan input atau misalkan saat rapat dan asistensi mendatangi Bappelitbang, BKAD dan juga Inspektorat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa secara umum implementasi SIPD telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa indikator yang menunjukkan bahwa sistem mampu mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah secara efektif.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bandung telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Implementasi ini mencakup berbagai sub fokus seperti pengguna, prosedur, data, perangkat lunak, infrastruktur, dan pengendalian internal.

1. Sub Fokus Pengguna menunjukkan bahwa Implementasi SIPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah melibatkan pengguna internal yang terdiri dari pejabat struktural seperti PA, KPA, PPTK, serta Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, dan Pembantu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Para pengguna ini telah

- menunjukkan kompetensi yang baik dalam menjalankan tugasnya, sehingga mendukung kelancaran operasional SIPD di lingkungan pemerintah daerah.
2. Sub Fokus Prosedur menunjukkan bahwa Prosedur implementasi SIPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan dilengkapi dengan pedoman internal seperti video tutorial dan bimbingan teknis. Pemerintah Kota Bandung juga menginisiasi pembuatan prosedur tambahan untuk mendukung pemahaman pegawai terkait penggunaan SIPD, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan.
 3. Sub Fokus Data menunjukkan bahwa Pengelolaan data dalam implementasi SIPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sudah mencerminkan alur yang sistematis, mulai dari pengumpulan data usulan Musrenbang hingga tahap validasi di berbagai level pemerintahan, seperti Bappelitbang, kecamatan, dan perangkat daerah terkait. Data yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar
 4. Sub Fokus Perangkat Lunak menunjukkan bahwa SIPD sebagai perangkat lunak berbasis web telah memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Aplikasi ini dirancang dengan sistem akses yang disesuaikan berdasarkan peran masing-masing pengguna di perangkat daerah, seperti akun admin TAPD perencanaan, TAPD keuangan, dan admin kepala SKPD.
 5. Sub Fokus Infrastruktur menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur dalam implementasi SIPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung cukup memadai, khususnya dari segi perangkat keras seperti komputer dan jaringan internet yang digunakan di kantor maupun saat bekerja dari rumah. Namun, terdapat kendala pada infrastruktur server SIPD yang dikelola di tingkat pusat, yaitu Kementerian Dalam Negeri, yang sering mengalami gangguan teknis saat beban akses tinggi.
 6. Sub Fokus Pengendalian Internal menunjukkan bahwa Pengendalian internal terhadap implementasi SIPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih belum optimal, terutama karena peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum sepenuhnya terintegrasi dalam pengawasan sistem. Inspektorat masih berfokus pada pengawasan dokumen fisik, tanpa akses penuh ke data SIPD untuk melakukan pengawasan secara langsung.

Meskipun implementasi SIPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung berjalan dengan cukup baik, prosesnya tidak terlepas dari berbagai kendala yang muncul pada beberapa aspek penting, seperti prosedur, data, perangkat lunak, infrastruktur, dan pengendalian internal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya perbaikan dan penyesuaian, baik melalui inisiatif internal pemerintah daerah maupun dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri.

1. Sub fokus Pengguna tidak memiliki kendala yang berarti dimana pengguna SIPD sudah sesuai dengan porsi masing-masing. Karena pekerjaan yang ada saat ini merupakan pekerjaan manual yang sebelumnya sudah dikerjakan dan sekarang dibuat menjadi online sehingga pengguna atau user yang ada sudah disesuaikan dengan tupoksi sebelumnya.
2. Sub fokus Prosedur memiliki kendala utama dalam prosedur implementasi SIPD adalah belum tersedianya petunjuk teknis (juknis) yang komprehensif dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga perangkat daerah harus mengandalkan panduan internal atau mencari referensi sendiri. Hal ini menyebabkan ketidakseragaman pemahaman di antara pengguna SIPD. Pemerintah Kota Bandung mencoba mengatasi kendala ini dengan membuat video

- tutorial dan menyelenggarakan bimtek, namun kebutuhan akan pedoman resmi yang lebih rinci tetap menjadi tantangan yang harus diatasi.
3. Sub Fokus Data memiliki permasalahan terkait data dalam implementasi SIPD terletak pada kurangnya kelengkapan informasi, khususnya dalam usulan Musrenbang yang tidak mencantumkan detail anggaran. Hal ini menghambat proses validasi dan perencanaan di tingkat perangkat daerah. Sebagai solusi, dilakukan asistensi untuk penyesuaian data dan usulan penambahan kolom data kepada Kementerian Dalam Negeri. Meski begitu, kebutuhan akan integrasi data yang lebih baik masih menjadi tantangan dalam pengelolaan informasi di SIPD.
 4. Sub fokus Perangkat Lunak (Software) memiliki kendala teknis pada perangkat lunak SIPD sering terjadi, seperti error saat login, gagal cetak dokumen RKA dan DPA, serta gangguan akses saat beban pengguna tinggi. Masalah ini diperparah dengan respons yang lambat dari pusat ketika ada gangguan sistem. Untuk mengatasi hal ini, perangkat daerah biasanya menghubungi helpdesk BKAD atau Bappelitbang, meskipun solusi sering memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan stabilitas sistem dan respons yang lebih cepat dari pusat.
 5. Sub fokus Infrastruktur memiliki kendala infrastruktur dalam implementasi SIPD berfokus pada kapasitas server yang sering mengalami downtime saat diakses secara bersamaan, menghambat kelancaran operasional. Karena server dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kota Bandung tidak memiliki kendali langsung atas perbaikan teknis tersebut. Upaya yang dilakukan meliputi penggunaan SIPD di luar jam sibuk dan pembagian jadwal akses untuk mengurangi beban server, meskipun solusi ini bersifat sementara dan tidak mengatasi masalah secara menyeluruh.
 6. Sub Fokus Pengendalian Internal memiliki kendala pengendalian internal terletak pada belum optimalnya peran Inspektorat dalam mengawasi implementasi SIPD secara langsung. Inspektorat masih bergantung pada dokumen fisik dan laporan manual dari OPD tanpa melakukan pengawasan berbasis sistem. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan hak akses Inspektorat terhadap data SIPD, pengembangan sistem early warning, serta kolaborasi lebih intensif antara Bappelitbang, BKAD, dan Inspektorat untuk memperkuat pengawasan secara real-time.

Secara keseluruhan, implementasi SIPD di Kota Bandung sudah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan yang harus dilakukan mulai dari pemerintah daerah hingga dari pemerintah pusat.

6. References

- Afifah, S. N., Subarno, A., & Akbarini, N. R. (2023). Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo. *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, 7(2), 171–178.
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan aplikasi Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen RKPD DI Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(1), 62–79.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2002). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*.
- Karundeng, A. B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, S. E. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *GOVERNANCE*, 1(2).

- Lexy, J. M. (2011). *Qualitative research methods. Bandung: Teenager Rosda Karya.*
- Mujilan, A. (2012). *Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Wawasan dalam Dunia Ektronis. Madiun. Universitas Widya Mandala Madiun.*
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2). <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Nisa, K. H., & Muntiah, N. S. (2024). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Microsoft Access 2019 pada Persediaan Barang di UD. Maju Mapan Pacitan. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 4(4), 482–496. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v4i4.680>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi. jakarta selatan: Salemba Empat.*
- Rukun, K., & Hayadi, B. H. (2018). *Sistem informasi berbasis expert system.* Deepublish.
- Sobandi, A., & Herdianti, D. S. (2023). Studi Literatur Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal MANAJERIAL*, 22(1), 125–134.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* PT Alfabet.
- Sutisna, I. D., Dwiputrianti, S., & Rahman, A. (2022). Model Implementasi Penyusunan Anggaran Belanja Pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung. *JRPA-Journal of Regional Public Administration*, 7(1), 28–40.
- Usman, N. (2002). *Konteks implementasi berbasis Kurikulum.* Jakarta: Grasindo.